

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT DI
KECAMATAN PATTALLASSANG
KABUPATEN GOWA

Disusun dan diajukan oleh:

Nur Maisarah Bohasan

E12116016



Kepada

DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT DI KECAMATAN
PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nur Maisarah Bohasan


E12116016


Telah diujikan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos M.Si
NIP. 196804112000121001


Rahmatullah, S.IP. M.Si
NIP. 197705132003121002

Mengetahui

**Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

Universitas Hasanuddin




Dr. H.A.M. Rusli, M.Si
NIP. 196407271991031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Maisarah Bohasan
NIM : E12116016
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul **Implementasi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat DiKecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa** adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2023

Yang menyatakan

Nur Maisarah Bohasan

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan karunianya, serta memberikan Ridho dan berkat kesehatan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat DiKecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”** Sebagai pemenuhan persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Strata-1(S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga. Namun dalam proses penulisan skripsi ini, penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak serta-merta berjalan lancar, terdapat beberapa kendala yang dilalui, akan tetapi penulis dapat menyelesaikannya dengan kerja keras dan usaha yang dilakukan oleh penulis serta doa dari berbagai pihak. Dan besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pihak lain.

Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati, dan sayangi. Karena telah turut serta membantu baik secara langsung

maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahku Bohasan Nakka dan Ibuku Mantasiah Sampara yang selalu mendoakan serta memberi semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil. Untuk tanteku Nuryana Nakka, yang selalu memberikan semangat tiada henti. Dan tidak lupa juga saya ucapkan trimksih kepada yang tersayang Irwan, yang selalu ada dan selalu memberi semangat tiap saat. Untuk sahabat saya cicci yuliah manaf, dan Nur Annisa Ramadhani yang selalu memberi semangat selalu.

Penulis mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada Program Strata-1 Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si selaku Pembimbing satu dan Bapak Rahmatullah S.IP, M.Si selaku Pembimbing Kedua sekaligus Pembimbing Akademik semenjak menjadi Mahasiswi diKampus Universitas Hasanuddin.

5. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, dan Bapak Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.IP selaku Tim Penguji yang telah memberikan saran dan masukan guna menyempurnakan Skripsi ini, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih.
6. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Rahmatullah S.IP, M.Si, Dr. Suhardiman Syamsu S.Sos, M.Si, Dr. Jayadi Nas M.Si, Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli M.Si, Prof, Dr. Juanda Nawawi, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, (Alm) Prof Dr. A. Gau Kadir, MA, Prof Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, Prof Dr. Rabina Yunus, M.Si, dan lainnya. Terima kasih banyak telah banyak memberikan ilmu pengetahuan.
7. Untuk seluruh Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu selama ini dibidang Akademik dan kemahasiswaan.
8. Terimakasih juga kepada semua pihak yang terlibat membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, yaitu; Pemerintah Kabupaten Gowa khususnya UPT Puskesmas Pattallassang, Kantor Camat Patallassang, Kantor Desa Pattallassang, Kantor Desa Borong pa'la'la, dan seluruh elemen yang terkait dilokasi penelitian dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Terima kasih Kepada teman seperjuangan saya Saudara(i) Verenigen Ilmu Pemerintahan 2016; Cicci yuliah manaf, Nurul Annisa Ramadani, Musdalifah Syukur, Heril, Valentini febriani Balalande, Jackson Matasak, Wahid Muharram, Astrid Triana Fatri, Hardianti Achmad, Ummu Aiman, Sarah Febriani, Rosmita Rahman, Maslahatul umma, Al Barsan Fahmi, Andi Aidil Fitrah, Ayulia, Annisa Varawanda, Hesti Amelia, Karmila Wijaya Kusumah, Chika Dariyanti, Wahyuni Syamsul, Agung, Ismail, Yusrisal Bhari, Alfira Pratiwi, Hajriana rahmania, Riswanda Imawan, Muhammad Rezky, Muh Iswatun Mu'si, Nur Azizah, Sri Merryanti, Wulan Fausiah Gaffar, Muhammad Romi, Aan, Fadhlhan Faturahman Fitran. Terimakasih atas kebersamaannya semoga kita semua dapat menggapai cita-cita kita, dan sukses selalu.
10. Terima kasih kepada keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) Fisip Unhas, yang telah merangkul penulis dan telah memberikan banyak pelajaran.
11. Dan untuk Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Sehat di Desa Bontomanai Kabupaten Gowa; Jayzul, Dewi Rahma Ente, Andi Isma Nadia, adhe yunia anwar, Bulkis, Irhamsyah, Agung, dan Gracia. Senang bertemu dengan kalian, terimakasih atas kerjasama dan kebersamaannya selama melaksanakan dan menyelesaikan KKN. Semoga kalian semua sehat selalu dan semoga kita dipertemukan kembali dalam keadaan sukses semua.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, semoga Allah SWT memberi balasan yang berlipat-lipat kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis berharap mendapat saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pihak pembaca.

Akhir kata, penulis berharap semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Terimakasih, Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, Juli 2023

Nur Maisarah Bohasan

ABSTRAK

NUR MAISARAH BOHASAN, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun Skripsi Dengan Judul; Implementasi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa (Dibimbing Oleh Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si dan Rahmatullah S.IP, M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program kabupaten sehat di Kecamatan Pattallassang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan serta mengungkapkan kejadian, dan keadaan mengenai penyelenggaraan program kabupaten sehat di kecamatan Pattallassang. Dengan berdasarkan fakta-fakta apa yang sebenarnya terjadi dilapangan dalam pelaksanaan program pembangunan di kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Pendamping dari Kabupaten (forum kabupaten sehat), Pemerintah Kecamatan (forum komunikasi kecamatan sehat), Dan Pemerintah Desa (pokja desa sehat) sudah melaksanakan tugas dengan maksimal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan beberapa program yang ada berdasarkan PERDA, namun dalam pelaksanaan program tersebut belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

Kata Kunci: Implementasi, Pemerintah Daerah, masyarakat.

ABSTRACT

NUR MAISARAH BOHASAN, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Compiled a thesis with the Title; Impementation of Regional Regulations Regarding the Implementation of Healthy Districts in Pattallassang District, Gowa Regency (Supervised by Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si and Rahmatullah S.IP, M.Si).

This study aims to determine how the implementation of the healthy district program in Pattallassang District is in accordance with Regional Regulation Number 01 Of 2018 concerning the implementation of Healthy Districts.

The type of research used in this research is Descriptive Qualitative, which is a study that aims to describe, describe and reveal events, and circumstances regarding the implementation of healthy district programs in Pattallassang sub-district. Based on the facts of what actually happened in the field in the implementation of development programs in Pattallassang sub-district, Gowa Regency.

The results of this study illustrate that the District Assistance (healthy district forum), the District Government (healthy sub-district communication forum), and the Village Government (healthy village working group) have carried out their duties optimally in improving the degree of public health with several existing programs based on PERDA, but the implementation of the program has not run optimally because it is influenced by low public awareness of health, and lack of public concern for environmental hygiene.

Keywords: Implementation, Local Government, Society.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Kebijakan	10
2.2. Pelaksanaan program kerja.....	17
2.3. Kabupaten Sehat	27
2.4. Penyelenggaraan Kabupaten sehat.....	30
2.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi penyelenggaraan	31
2.6. Kerangka Konseptual	34

BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Pendekatan dan jenis penelitian	37
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian	37
3.3. Fokus Penelitian.....	38
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5. Informan Penelitian	41
3.6. Teknik Pengumpulan Data	42
3.7. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Gambaran Umum Lokasi penelitian	44
4.1.1. Profil kabupaten Gowa.....	44
4.1.2. Visi dan misi kabupaten Gowa	46
4.2. Gambaran umum kecamatan pattalassang kabupaten gowa	46
4.3. Gambaran umum desa pattalassang kabupaten gowa.....	48
4.4. Gambaran peraturan daerah nomor 01 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kabupaten sehat.....	49
4.5. Pembahasan	51
4.5.1. Penyelenggaraan Kabupaten sehat di Kabupaten Gowa	51
4.5.2. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Sehat di Kecamatan Pattalassang	53
4.5.3. Penyelenggaraan Pokja Desa Sehat di Desa Pattalassang	59
4.5.4. Penyelenggaraan Pokja Desa Sehat Di Desa Borong Pa'la'la.....	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1. Kesimpulan.....	70
5.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual	29
Gambar 2 Struktur Organisasi Forum Komunikasi Kecamatan sehat di kecamatan pattallassang.....	58
Gambar 3 struktur Organisasi Pokja/Kelurahan Sehat desa pattallassang di kecamatan pattallassang	62
Gambar 4 Struktur Organisasi Pokja/Kelurahan sehat Desa Borong Pa'la'la di Kecamatan Pattallassang.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kecamatan dan luas kecamatan di kabupaten Gowa.....	38
Tabel 2 rencana kerja Forum Komunikasi kecamatan sehat kecamatan pattallassang	50
Tabel 3 rancangan kerja Pokja/Kelurahan Sehat Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang	55
Tabel 4 rancangan kerja Pokja/Kelurahan Sehat Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang kita harapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Seperti dari sebuah Undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentunya siapa saja yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana cara mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat, juga pembangunan tidak mungkin terselenggara dengan baik tanpa tersedianya salah satu modal dasar yaitu kesehatan masyarakat.

Kesehatan masyarakat harus menjadi acuan dalam pembangunan baik sebelum berjalan maupun sedang berjalan. Derajat kesehatan berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan.

Internal kesehatan masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi pada suatu wilayah mengacu pada teori Hendril L Blumm, yang menyatakan ada 4 komponen utama yang harus disentuh dalam pencapaian status kesehatan yaitu: hereditas, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan perilaku.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif (Turunan) dari kebijakan tersebut. Dan Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjabar atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Kondisi lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan salah satu kebutuhan asasi bagi setiap masyarakat. Khususnya masyarakat Indonesia, Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang bertujuan

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang se tinggi-tingginya. Sehingga dalam hal ini, pembangunan kesehatan tersebut perlu melibatkan seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang di organisir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan, pekerjaan yang sehat, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada lingkup nasional, Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan pada Pasal 9 UUD Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan atas hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal juga terdapat dalam Pasal 4 UUD Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kesehatan merupakan

salah satu kebutuhan dasar manusia, karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang.¹

Setiap Negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan, Di Indonesia permasalahan sampah yang ada saat ini tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan dan kesehatan, akan tetapi juga permasalahan serius yang berdampak pada perekonomian daerah. Sehingga untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya peran pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Peranan Negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama didalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Dengan begitu untuk mencapai hal tersebut, dapat melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah melalui Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2005 dan No.1138/Menkes/PB/VII/2005 Menetapkan Pedoman Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

Penyelenggaraan Kabupaten sehat merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan suatu lingkungan yang sehat, dengan melalui pemberdayaan masyarakat, dan forum yang di fasilitasi oleh pemerintah Kabupaten. Forum adalah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi. Forum Kabupaten Sehat berperan untuk

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

menentukan arah, prioritas, perencanaan pembagunan wilayah yang mengintegrasikan berbagai aspek, sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya, pembangunan kesehatan masih jauh dari yang diharapkan. Permasalahan-permasalahan masih banyak terjadi, antara lain penyakit-penyakit seperti DBD, Flu burung, dan sebagainya. Prioritas kesehatan rendah serta tingkat pencemaran lingkungan yang semakin tinggi. Minimnya sarana dan prasarana dalam peningkatan kualitas lingkungan, Serta kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat. Padahal Sebenarnya individu yang menjadi faktor penentu dalam menentukan status kesehatan.

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan Penyelenggaraan program Kabupaten sehat. Kabupaten sehat merupakan suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, dan sehat untuk dihuni oleh masyarakat dengan mengoptimalkan potensi perekonomian masyarakat yang saling mendukung dengan melalui koordinasi forum kecamatan yang difasilitasi oleh sektor yang berkaitan dengan perencanaan dari tiap masing-masing desa. Oleh karena itu, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan YL. S.H, M.H. Dalam mewujudkan lingkungan masyarakat Kabupaten Gowa yang sehat, menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 01 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan Kabupaten Sehat, melihat disetiap wilayah yang ada di Kabupaten Gowa masyarakat kurang perhatian terhadap lingkungan.

Seperti masalah pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, sampah yang menggunung dan berserakan dimana-mana, yang tentunya akan merusak pemandangan lingkungan sekitar serta menimbulkan bau yang tidak sedap yang akan menjadi kerumunan wabah penyakit, Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat setiap tahunnya meningkat.

Adapun maksud ditetapkannya PERDA tersebut untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup masyarakat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi setiap masyarakat serta terwujudnya forum yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat, dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik. Maka dari itu, saat ini pemerintah khususnya pemerintah daerah lebih memfokuskan perhatiannya kepada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Sehingga pemerintah membuat program-program yang dapat mengembangkan potensi masyarakat dengan menciptakan masyarakat desa yang berperilaku sehat secara mandiri. Lingkungan sehat menjadi salah satu faktor utama demi berlangsungnya hidup yang bersih, sehat, dan nyaman. Terhindar dari berbagai macam penyakit merupakan problem yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga masyarakat dan juga pemerintah. Adapun program yang dijalankan pemerintah desa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat adalah program desa sehat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Setiap Negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan, Sehingga untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya peran pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Tetapi di sisi lain, Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sangat familiar untuk saat ini, kebanyakan dari mereka berfikir secara parsial dan hanya ingin menguntungkan dirinya sendiri. Kasus seperti ini yang selalu mempengaruhi kesehatan masyarakat setiap tahunnya meningkat, sehingga atas dasar inilah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT DI KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada permasalahan yang telah diutarakan peneliti di latar belakang maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program kabupaten sehat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penyelenggaraan kabupaten sehat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program kabupaten sehat di Kecamatan pattallassang Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penyelenggaraan kabupaten sehat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi Akademisi, penelitian ini akan mampu menambah perspektif civitas akademika Prodi Ilmu Pemerintahan, sebagai bahan kajian tentang bagaimana proses pelaksanaan program

kabupaten sehat di setiap daerah berdasarkan Peraturan Daerah.

2. Dari segi Teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah pemahaman bagi pelaksana dan bagi peneliti akan bagaimana proses pelaksanaan program kerja dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat. Dan dapat menambah pengetahuan juga tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi implementasi penyelenggaraan kabupaten sehat.
3. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu referensi bagi pemerintah akan bagaimana pelaksana program kerja dalam penyelenggaraan Kabupaten sehat.
4. Manfaat Metodologis, diharapkan Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca, juga dapat menjadi sebuah referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan Implementasi penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan sebuah masalah perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Dengan begitu .perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran bahwa dari sudut mana masalah tersebut disoroti. Kemudian teori merupakan serangkaian bagian, konsep, definisi, asumsi, dan konstruksi untuk menjelaskan secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan dengan konsep. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis akan mengemukakan teori, konsep, dan gagasan yang akan dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam menyusun.

2.1 Kebijakan

Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Kebijakan sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekadar keputusan spesifik. Dalam arti spesifik, ide kebijakan berkaitan dengan cara atau alat (means) dan tujuan (ends), dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Menurut Hoogerwerf dalam buku Miriam Budiardjo (2008:20) mengemukakan bahwa “obyek dari ilmu politik adalah kebijakan

pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum (public policy) disini menurut Hoogewerf ialah, membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan (doelbewuste vormgeving aan de samenleving door middle van machtsuitoefening)”

Kebijakan menurut Said Zainal Abidin (2004:31) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu: (1) Kebijakan Umum, merupakan kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif atau bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. (2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. (3) Kebijakan Teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.²

Starling dalam buku Arifin Tahir (2014:28) menjelaskan adanya lima tahap proses terjadinya kebijakan publik, yakni: (1) Identification of needs, yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria antara lain: menganalisa data, sampel, data statistic, model-model simulasi, analisa sebab akibat dan tehnik-tehnik peramalan; (2) Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategis, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan; (3) Adopsi

² Budiardjo, Miriam. 2008. **Dasar-Dasar Ilmu Politik**. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

yang mencakup analisa kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan tehnik-tehnik penganggaran; (4) Pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga, dan skenario pelaksanaannya; (5) Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi mendadak. Menurut Dye dalam buku Arifin Tahir (2014:25) kebijakan publik adalah "whatever governments choose to do or not to do". Konsep tersebut menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan menurut Dye adalah upaya untuk memahami: (1) apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah; (2) apa penyebab atau yang memengaruhinya; (3) apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan. Bentuk asli nyata dari implementasi yaitu menjalankan rencana yang telah dirancang sebelumnya. Implementasi seharusnya dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Jika tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat dikhawatirkan capaian hasil tidak dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Implementasi kebijakan disebut sebagai suatu tahap dalam proses kebijakan segera setelah kebijakan ditetapkan. Implementasi kebijakan

menurut Budi Winarno (2014:147) dipandang secara luas, sebagai tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Menurut Grindle dalam buku Budi Winarno (2014:149) berpendapat bahwa "tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah." Merilee S Grindle menitikberatkan implementasi kebijakan pada isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan mencakup : (1) kepentingan yang dipengaruhi; (2) manfaat yang dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) pelaksana program; serta (6) sumberdaya yang dikerahkan.³ Sementara itu konteks implementasinya adalah: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga; dan (3) kepatuhan dan daya tanggap (Soesilowati, 2008:55). Kebijakan diimplementasikan oleh eksekutif atau pemerintah. Tidak hanya pemerintah saja yang mengimplementasikan suatu kebijakan tersebut, terdapat pula pihak di luar pemerintah yang mengimplementasikan. Civil society organizations (CSOs) memiliki peran yang tidak kalah strategisnya dalam membantu

³ Winarno, Budi, 2014. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

pemerintah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program mereka dibanding institusi atau stakeholder lain. Tiga kegiatan utama yang paling penting dari implementasi adalah (1) penafsiran, yaitu kegiatan yang menterjemahkan makna program ke dalam peraturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan; (2) organisasi, merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan; (3) penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah dan lain-lain.

Riant Nugroho dalam buku Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah karya Arifin Tahir (2014:54) mengemukakan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Dari dua pilihan tersebut, diharapkan agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka seharusnya pula memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program yang realitas, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik. Menurut pendapat para tokoh di atas bahwa implementasi kebijakan tidak lain memiliki kaitan dengan cara kebijakan tersebut agar dapat mencapai tujuan awal kebijakan. Mencapai tujuan dengan melalui berbagai bentuk program-program serta melalui derivate.

Implementasi secara garis besar merupakan suatu proses di mana dilaksanakan setelah kebijakan dibuat dan disahkan melalui program-

program yang masih berpedoman kepada kebijakan yang dapat berupa undang-undang atau peraturan daerah. Implementasi kebijakan dimaksudkan bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan menyangkut masalah konflik, keputusan, siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan (Soesilowati, 2008:48).

Beberapa ahli mengemukakan teori mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Menurut pendapat Meter dan Horn bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (a) Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi apabila standard dan sasaran kebijakan kabur. (b) Sumber daya, di mana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. (c) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementator sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. (d) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. (e) Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini

mencakup sumber daya ekonomi lingkungan kebijakan yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. (f) Disposisi implementator yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

- b. Teori David L. Wimer dan Aidan R. Vinning, Teori yang dikemukakan yaitu terdapat tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: (a) Logika Kebijakan, dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapatkan dukungan teoritis. (b) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada suatu daerah bisa gagal di implementasikan pada daerah lain. (c) Kemampuan implementator kebijakan. Tingkat kompetensi implementator mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan Subarsono(2008:89).

Grindle dalam buku Leo Agustino (2016:129) mengemukakan bahwa Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Proses implementasi merupakan proses yang rumit dan kompleks. Hal tersebut dipahami karena proses implementasi melibatkan interaksi banyak variabel sekaligus merumuskan mekanisme delivery activities. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:86) Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak.⁴

2.2 Pelaksanaan

a. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya di lakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelaksanaan dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya, yang dirancang/didesain

⁴ Leo agustino, 2016 dasar-dasar kebijakan publik, BANDUNG:Alfabeta

untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.⁵ Pelaksana yang dimaksud disini dalam penyelenggaraan kabupaten sehat yaitu; Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Dan Pemerintah Desa.

Secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang di tetapkan semula.⁶

Dari pengertian yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan itu bukan sekedar aktivitas, aksi, ataupun tindakan, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Jadi, pada dasarnya pelaksanaan dalam suatu program yang telah di tetapkan oleh pemerintah itu harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang dimana dalam kegiatan

⁵ <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>,

⁶ Abdullah Syukur. 1987. KumpulanMakalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan", Persadi Ujung Pandang. Hlm 40

tersebut melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Adapun faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan.⁷
- b. *Resouces* (sumber daya) hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.⁸
- c. Disposisi, sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terdapat program khususnya dari mereka yang menjadi pelaksanaan program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola baku.

⁷ Kleinjan dalam Hafid Canggara, Pengantar Ilmu Komunikasi, hal. 1.

⁸ Henry Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (2006:5)

Dari keempat faktor ini, dipandang mempengaruhi keberhasilan dalam suatu proses implementasi. Dan saling mempengaruhi antara faktor satu dan faktor yang lainnya. Selain itu juga dalam proses implementasi terdapat sekurang-kurangnya 3 (Tiga) unsur penting dan mutlak, yaitu:⁹

- a. Adanya program (Kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dalam suatu program senantiasa dapat melibatkan ketiga unsur diatas untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

2.3 Konsep Program

a. Pengertian Program

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek sebagai berikut:

⁹ Abdullah Syukur, *Ibid.* Hal 398

- a. Adanya tujuan yang hendak dicapai
- b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu.
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan (Manila, 2006 : 43).

Menurut Keban (2004 : 35), mengatakan “Apakah program efektif atau tidak, sehingga ada beberapa standar penilaian yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Organisasi

Organisasi pelaksanaan program, organisasi ini harus memiliki struktur organisasi. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Struktur organisasi yang kompleks, struktur ditetapkan sejak semula dengan desain dari berbagai komponen atau subsistem yang ada tersebut. Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini petugas yang terlibat didalam pelaksanaan program. Adapun tugas aparat pelaksana program yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan negara. Agar tugas

pelaksana program dapat dilaksanakan secara efektif maka setiap aparatur dituntut memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Interpretasi

Maksudnya agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus diperhatikan bahwa apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

- Sesuai dengan Peraturan; Setiap pelaksanaan kebijaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik peraturan di Tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten.
- Sesuai dengan petunjuk pelaksana; sesuai dengan Petunjuk Pelaksana berarti, Pelaksanaan kebijaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang sifatnya administratif. Sehingga hal ini memudahkan pelaksana dalam melakukan aktifitas pelaksanaan program.
- Sesuai petunjuk Teknis; artinya kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional, dan realistis.

Menurut Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008: 9) mengemukakan program sebagai salah satu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Sedangkan Hasibuan (2006: 7) mengatakan bahwa Program adalah suatu jenis rencana yang jelas dan juga konkret karena didalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Dalam proses pelaksanaan dalam suatu program sesungguhnya dapat berhasil dan kurang berhasil, hal ini dapat ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam pelaksanaan tersebut turut bermain terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dengan tujuan dapat membawa hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

b. Program Kerja

Program kerja adalah program-program yang nyata yang mungkin untuk di implementasikan untuk mencapai misi organisasi. Menurut Santosa dalam Soesanto (2011:17) Program kerja adalah suatu sistem

rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi.

Sedangkan menurut E Hetzer (2012:13) berpendapat bahwa program kerja adalah aktivitas yang menggambarkan dimuka bagian mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut petunjuk-petunjuk mengenai cara pelaksanaannya. Aktivitas menggambarkan di muka ini biasanya menyangkut juga jangka waktu penyelesaian, pembagian wewenang, dan tanggung jawab serta kejelasan lainnya yang di anggap perlu. Kemudian setelah ditargetkannya target dan tujuan dari program, maka tindakan yang harus di ambil yaitu:

1. Sarana Dan Prasarana

Kondisi dan kemampuan semua sarana dan prasarana yang ada, tujuannya untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana tersebut masih layak operasi atau tidak.

2. Metode

Semua metode yang digunakan dan proses yang dijalankan untuk menjalankan program kegiatannya.

3. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Untuk mengetahui kemampuan sumber daya manusia terhadap metode dan proses kerja oleh pimpinan organisasi untuk memenuhi sampai dimana kemampuan anggota dalam melaksanakan pekerjaannya.

4. Semangat Kerja

Seorang pimpinan harus mengetahui kondisi dan sifat bawahan mereka, sehingga seorang pimpinan mampu memberi semangat kerja pada pelaksana tentang kebajikan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pelaksanaan program kerja adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok agar membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c. Keberhasilan Program

Dalam setiap melaksanakan kegiatan atau program dalam suatu wilayah, hal yang di inginkan oleh masyarakat adalah keberhasilan dari program tersebut. Dengan demikian untuk melihat suatu keberhasilan dari suatu program maka Menurut Poewarko (2012:110) mengemukakan beberapa indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- a. Jumlah warga yang secara nyata tertarik dalam kegiatan yang dilaksanakan

- b. Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan
- c. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan/persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan
- d. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan
- e. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah
- f. Meningkatkan kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan
- g. Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit malaria
- h. Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan
- i. Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan
- j. Meningkatnya kemandirian kesehatan masyarakat.

Kemudian sebelum melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terlebih dahulu keberhasilan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program harus diketahui indikator yang digunakan dalam program adalah;

- a. Indikator Input; Untuk mengukur jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan program
- b. Indikator Proses; Untuk menggambarkan perkembangan/aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan (partisipasi)

- c. Indikator Keluaran; Untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu program, sejauh mana terlaksana sesuai rencana
- d. Indikator hasil; Untuk menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan
- e. Indikator dampak; Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan umum dari program.

2.3. Kabupaten Sehat

a. Pengertian Kabupaten Sehat

Kabupaten sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Ada beberapa Kebijakan Kabupaten/Kota sehat yang perlu diketahui:

- a. Menyelenggarakan semua program kesehatan dalam rangka mengatasi permasalahan kesehatan di daerah.
- b. Pelaksanaan program-program kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum kabupaten/kota sehat, forum Komunikasi sehat di Kecamatan, dan Pokja sehat di Desa/Kelurahan.
- c. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan forum menetapkan pilihan tatanan, kegiatan serta jenis dan besaran indikatornya.
- d. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat diwujudkan dengan menyelenggarakan semua program yang menjadi permasalahan di

daerah, secara bertahap dimulai kegiatan prioritas bagi masyarakat di sejumlah Kecamatan pada sejumlah Desa/Kelurahan.

- e. Pelaksanaan Kabupaten sehat dilaksanakan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan dengan melalui pembentukan Forum yang disepakati masyarakat. Dengan dukungan Pemerintah daerah dan mendapatkan fasilitasi dari instansi terkait, melalui program yang telah direncanakan.
- f. Setiap Kabupaten/Kota menetapkan kawasan potensial sebagai (entry point) yang dimulai dengan kegiatan sederhana yang disepakati masyarakat, kemudian berkembang dalam suatu kawasan atau aspek yang lebih luas.
- g. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat lebih mengutamakan proses dari pada target, berjalan terus-menerus dimulai dengan kegiatan prioritas dalam suatu tatanan kawasan dan dicapai dalam waktu yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan semua stakeholder yang mendukung.
- h. Kesepakatan tentang pilihan tatanan Kabupaten/Kota sehat dengan kegiatan yang menjadi pilihan serta jenis dan besaran indikatornya ditetapkan oleh forum bersama-sama dengan pemerintah daerah.
- i. Evaluasi kegiatan Kabupaten/Kota sehat dilakukan oleh forum dan pokja Kabupaten/Kota sehat bersama pemerintah daerah, LSM, dll.

Adapun ciri-ciri Kabupaten Sehat yaitu;

- a. Pendekatan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

- b. Berasal dari kebutuhan masyarakat, dikelola oleh masyarakat, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator.
- c. Mengutamakan pendekatan proses daripada target, tidak mempunyai batas waktu, berkembang sesuai sasaran yang diinginkan masyarakat yang dicapai secara bertahap.
- d. Penyelenggaraan kegiatan didasarkan kesepakatan dari masyarakat setempat, bersama Pemerintah Kabupaten.
- e. Pemerintah Kabupaten merupakan partner kunci yang melaksanakan kegiatan.
- f. Kegiatan tersebut dicapai melalui proses dan komitmen pimpinan daerah, kegiatan inovatif dari berbagai sektor yang dilakukan melalui partisipasi masyarakat dan kerjasama.¹⁰

Kabupaten/Kota Sehat adalah salah satu program pembangunan berwawasan kesehatan, yang menitikberatkan pada integritas lintas sektor dan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Kabupaten/Kota sehat merupakan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas serta perekonomian yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.¹¹

Kabupaten sehat adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni oleh penduduk, yang melalui

¹⁰ <https://bone.go.id/2016/05/12/pengertian-kabupaten-kota-sehat/>

¹¹ <https://banyuasinkab.go.id/2020/12/kabupaten-kota-sehat-kks-harus-berdayakan-masyarakat/>

terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan pemerintah daerah.¹²

2.4. Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Penyelenggaraan berasal dari kata “selenggara” yang berarti mengatur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penyelenggara adalah orang yang menyelenggarakan atau pelaksana. Penyelenggaraan Kabupaten sehat merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan suatu lingkungan yang sehat, dengan melalui pemberdayaan masyarakat, dan forum yang di fasilitasi oleh pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 pada BAB III “Penyelenggaraan” (pasal 5). Penyelenggaraan kabupaten sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah Daerah untuk mewujudkan kabupaten sehat. Yang dimana Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilaksanakan melalui forum dan kelompok kerja, forum dan kelompok kerja.

Secara umum forum kabupaten sehat merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi turut menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni oleh warganya.

¹² Perda Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Forum Kabupaten Gowa sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada tingkat Kecamatan.

2.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Penyelenggaraan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu implement yang artinya mengimplementasikan. Menurut Van Meter dan Van Horn (2013:11) mendefinisikan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan kebijakan.

Widodo (2011:19) mendefinisikan implementasi sebagai penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan dapat menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu tertentu.

Fungsi implementasi merupakan tindakan untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran-sasaran negara di wujudkan sebagai hasil akhir kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai program kerja. Sehingga dengan demikian fungsi implementasi terdiri dari tindakan/cara atau sasaran tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Menurut, George C. Edward III (Nawawi, 2009:138) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. *Comunication* (Komunikasi)

Komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran. Hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

2. *Resources* (Sumberdaya)

Merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak berjalan dengan efektif.

Adapun sumberdaya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan terwujud, seperti;

a. sumberdaya manusia

Merupakan salah satu variable yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

b. sumberdaya anggaran

Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas, dan terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. sumberdaya peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi; gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

d. sumber daya informasi dan kewenangan.

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Karena kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi wewenangnya.

3. *Disposition* (disposisi) Adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn

(Widodo, 2007:105) terdapat 3 macam elemen yang mempengaruhi disposisi. Yaitu;

a. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan yang tinggi yang dimiliki aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut.

b. Pemahaman dan Pendalaman

Ini juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Respon masyarakat juga dapat menentukan arah keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan.

2.6. Kerangka Konseptual

Pemerintah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat. Pelaksana

penyelenggara Kabupaten sehat yaitu; (a) Pemerintah Kabupaten (Forum Kabupaten sehat), (b) Pemerintah Kecamatan (Forum Komunikasi Kecamatan sehat), dan (c) Pemerintah Desa (Kelompok Kerja/Pokja Desa Sehat).

Peran dari ketiga tersebut sangat berpengaruh dalam menjalankan suatu program/kegiatan pembangunan di dalam masyarakat. Pelaksanaan pembangunan di Kecamatan nampak adanya kelemahan dalam koordinasi pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan terkesan belum terwujud secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh indikasi adanya program atau kegiatan pembangunan yang belum berhasil dalam pelaksanaannya. Untuk mewujudkan integrasi pembangunan di kecamatan maka koordinasi harus dilakukan dengan baik dan efektif pada tahap program perencanaan pembangunan yaitu dengan melibatkan Masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dalam suatu wilayah. Dengan demikian dari penjelasan tersebut diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat saling berkoordinasi dalam mewujudkan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat untuk masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana kinerja masing-masing forum di Kecamatan Pattallassang dalam melaksanakan program kabupaten sehat. Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menggambarkannya dalam kerangka pikir sebagai berikut;

Gambar 1 *Kerangka Konseptual*

